



RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

WATANSOPPENG
2017



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Salotungo No. ... Telp. (0484) 21619 Watansoppeng Kode Pos 90812

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 3382/KDS/VIII/2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - bahwa keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang mendesak dan menutupi defisit anggaran tahun berjalan;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c serta sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahun berjalan yaitu Tahun 2017.

Pasal 2

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 8 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



NUR ALAM, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19581231 198503 1 182

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan dengan salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai tindak lanjutnya pada masing-masing SKPD adalah penyusunan Rencana Kerja SKPD yang mengacu pada RPJMD, hal ini dimaksudkan agar kerangka pembangunan yang telah disusun menjadi satu kesatuan perencanaan yang utuh, konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya sebagaimana hal tersebut dan untuk mengembangkan potensi pemerintahan dan pembangunan daerah agar lebih berkualitas, Sekretariat daerah kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan.

Adapun Proses penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Soppeng.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD dan kemudian PERUBAHAN RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja SKPD) tahun 2017 ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Perubahan Renja SKPD) tahun 2017 bertujuan sebagai alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Disamping itu juga ditujukan sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan Renstra tahun 2016-2021

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan, memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup, memuat tentang Penutup dan Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra SKPD yang telah dibuat, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan ataupun program yang telah disusun akan terlihat pada evaluasi hasil pelaksanaannya yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun berjalan dan Capaiannya, tergambar dalam tabel pada halaman berikutnya:

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Saluran Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Laku (2016) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017) | | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Kategori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|---|---------------|--|---------------|--|-------------|--|---------------|---------------|--------|--|-----------|----------------------------|----------------------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|------------|------|---------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------|--|---|-------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|-------------|------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------------|---|---------------------|------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|--|------|-------------|---------------|-------|-----------|-----------|-------------------|--|---|-------|-------------|-------------|------------|--|--|--|------------|------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------|--|--------------------------------|------|------------|---------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|---------------|------|-----------|-----------|-------------------|--|--------------------------------|------|-------------|---------------|------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|------|-----------|-----------|-------------------|--|------------------|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------|--|------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|------------|--|--|--|------------|-------------|---------------|------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.201.20.03.02.23 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga bagi bupati dan keluarga | Terselesaikan pembelian rumah tangga bupati dan keluarga | bulan | 5 | 7.869.922.200 | 1.122.000.000 | 1.999.400.000 | 21.800.000 | | 221.740.000 | 0,00 | 5.956.919.000 | 0,00 | 75,69 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.24 | Penyediaan biaya pemeliharaan kendaraan dinas/DAKDH | bulan | 5 | 771.561.000 | 110.000.000 | | | | | | 0,00 | 215.910.473 | 0,00 | 27,98 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ruang Studio Pagi | bulan | 12 | 45.302.000 | | | | | | 0,00 | 45.302.000 | 0,00 | | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.05 | Pengkondisian Dinas | unit | 15 | 2.085.214.700 | 297.000.000 | | | | | | 0,00 | 7.661.025.399 | 0,00 | 367,75 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.07 | Pengkondisian Peningkatan Gedung Kantor | bulan | 24 | 127.900.000 | | | | | | | 0,00 | 127.900.000 | 0,00 | | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.08 | Pengadaan perabot rumah tangga | unit | 10 | 1.711.484.326 | 24.400.000 | 35.400.000 | | | | 35.400.000 | 2,09 | 3.554.558.832 | 0,00 | 207,69 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.09 | Pengadaan perabot rumah tangga | unit | 5 | 3.405.640.000 | 50.000.000 | 55.206.000 | | | | 103.706.000 | 0,00 | 4.616.347.400 | 0,00 | 135,55 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.10 | Pengadaan Meubel | bulan | 24 | 1.831.530.000 | 300.000.000 | 105.000.000 | | | | 165.000.000 | 0,00 | 767.573.500 | 0,00 | 41,91 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.20 | Pemeliharaan/berkala rumah jabatan | unit | 10 | 1.103.332.230 | 157.300.000 | 45.000.000 | | | | 45.000.000 | 0,00 | 1.217.461.300 | 0,00 | 110,36 | Bag. Umum | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.201.20.03.02.22 | Pemeliharaan/berkala gedung kantor | unit | 5 | 1.341.020.000 | 200.000.000 | 50.000.000 | | | | 301.750.000 | 0,00 | 1.635.792.820 | 0,00 | 121,98 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.23 | Pemeliharaan/berkala mobil | unit | 10 | 4.010.307.889 | 571.742.050 | 402.188.850 | | | | 79.690.750 | 0,00 | 2.301.545.502 | 0,00 | 57,39 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.24 | Pemeliharaan/berkala kendaraan dinas/operasional | unit | 270 | 11.611.993.050 | 1.655.500.000 | 164.483.352 | | | | 616.033.852 | 0,00 | 11.181.305.922 | 0,00 | 96,29 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.25 | Pemeliharaan/berkala peralatan rumah tangga | unit | 10 | 732.982.950 | 104.500.000 | 65.000.000 | | | | | 0,00 | 486.447.150 | 0,00 | 66,37 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.26 | Pemeliharaan/berkala peralatan rumah jabatan | unit | 60 | 825.570.270 | 117.700.000 | 11.850.000 | | | | 11.850.000 | 0,00 | 472.133.750 | 0,00 | 57,19 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.27 | Pemeliharaan/berkala peralatan rumah jabatan | bulan | 24 | 15.870.000 | | | | | | | 0,00 | 15.870.000 | 0,00 | 0,00 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.28 | Pemeliharaan/berkala peralatan rumah jabatan | bulan | 24 | 190.889.000 | | | | | | | 0,00 | 190.889.000 | 0,00 | 0,00 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.29 | Pemeliharaan/berkala peralatan rumah jabatan | bulan | 12 | 466.200.000 | 220.000.000 | | | | | | 0,00 | 55.000.000 | 0,00 | 11,80 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.30 | Pemeliharaan/berkala peralatan rumah jabatan | bulan | 24 | 297.950.000 | | | | | | | 0,00 | 297.950.000 | 0,00 | 0,00 | Bag. Umum | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.201.20.03.02.31 |
| 1.201.20.03.02.32 | Pemeliharaan/berkala peralatan rumah jabatan | sat | 222 | 578.264.675 | 101.750.000 | 30.000.000 | | | | 81.800.200 | 0,00 | 634.300.200 | 0,00 | 109,69 | Bag. Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Saluran Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran yang dievaluasi (2017) | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017) | | | | Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) | Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2017 (Akrif Tahun Pelaksanaan Renja SKPD th.2017) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2017 (Akrif Tahun Pelaksanaan Renja SKPD th.2017) | Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2017 (%) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|-----|--------------------|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--|----|----|----|--|----|----|----|--|--|--|---|----------------------------|-----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | Program Peningkatan Pelayanan Kodinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.201.20.03.16.01 | Dukok audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota or ganisasi sosial dan masyarakat lainnya | Aspirasi Masyarakat | kali | 152 | 6.921.759.975 | 887.250.000 | 1.101.000.000 | 152.150.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.201.20.03.16.02 | Kunjungan kegiat sebagai narasumber/kegiatan sebagai pemantau dan sebagai pemantau non deparatemen/ luar daerah | Kunjungan Kejari Tamu | kali | 134 | 7.788.136.724 | 1.110.340.000 | 1.670.000.000 | 54.355.900 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.201.20.03.16.04 | Rapat koordinasi pejabat pemertah daerah | Kodinasan Bupati/wakil Bupati | kali | | 11.470.500 | 175.200.000 | | 115.634.700 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.201.20.03.16.05 | Kunjungan kegiat/ inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah dan koordinasi dengan pemertah pusat dan pemertah daerah lainnya | Kunjungan kegiat/ inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah dan koordinasi dengan pemertah pusat dan pemertah daerah lainnya | kali | 1.112 | 1.180.488.330 | 168.300.000 | 106.800.000 | 26.700.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.201.20.03.16.06 | Koordinasi dengan pemertah pusat dan pemertah daerah lainnya | | kali | 655 | 4.711.151.466 | 671.660.000 | 522.300.000 | 159.144.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4.04.4.04.03.01 | Program Pelayanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.04.4.04.03.01.04 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersosialisasinya Administrasi Keuangan | Bln | 12 | 653.771.718 | 446.534.880 | 477.560.450 | 84.537.700 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.04.4.04.03.01.10 | Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Bln | 13 | 97.000.000 | 82.395.000 | | 30.533.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.04.4.04.03.04 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.04.4.04.03.04.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kerja SKPD | Penyusunan RKA, LPA, DPPA tepat waktu | dkk | 3 | 432.772.007 | 59.018.410 | 28.625.000 | 4.902.200 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.04.4.04.03.04.02 | Penyusunan laporan keuangan | Terselenggaranya Dokumen Laporan Keuangan | dkk | 2 | 40.262.750 | 27.500.000 | 12.450.625 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.04.4.04.03.04.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Mdr Tahun | Terselenggaranya laporan keuangan mdr tahun | dkk | 2 | 59.664.553 | 40.751.492 | 22.275.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.04.4.04.03.04.04 | Peningkatan Manajemen /Asal Usul yang Daerah | Meningkatnya Manajemen Asesring daerah yang Baik dan Lengkap | Bulan | 12 | 158.516.281 | 108.268.753 | 45.837.500 | 7.438.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pemberian perimbangan, pengap dan pendampingan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sulawesi Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta koordinasi lainnya | Jumlah rapat/rapat koordinasi dan konsultasi | apar atskpd | | | | 92.833.400 | 24.557.400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan administrasi perimbangan | Pelayanan administrasi perimbangan | apar atskpd | | | | 86.191.801 | 11.201.000 | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Saluran Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD Tahun Akhir Periode Renstra SKPD | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renstra SKPD Tahun Laku (2016) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran yang direvisi (2017) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Direvisi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2017 (AHR Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Kat | | |
|-----|------|---|--|---|--|-------------|--|-------------|--|------------|---------------------------------|----|------------|----|--|-------|--|-----|--|-------|----------------------------|-----|----|----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 2 | Program Binaq dan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1. Mendukung proses legalisasi dan pengendalian kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban konstitusi | LHP | 537 | 541.666.396 | 80 | 223.010.000 | 85 | 77.224.216 | 72.330.000 | 30 | 15.637.500 | 30 | 34.747.500 | 35.29 | 48.04 | 110 | 257.757.500 | 20.48 | 47.59 | 16 | 17 | |
| | | | 2. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | Pembi | 72 | 270.832.702 | | | 12 | 38.612.109 | 29.637.500 | 3 | 6.825.000 | 3 | 8.575.000 | 25.00 | 28.93 | 3 | 8.575.000 | 4.17 | 3.17 | | | |
| | | | 3. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 33. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 35. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 36. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 37. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 39. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 41. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 42. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 43. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 45. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 46. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 47. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 48. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 51. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 52. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 54. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 55. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 56. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 57. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 58. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 59. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 60. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 61. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 62. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 63. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 64. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 65. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 66. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 67. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 68. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 69. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 70. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 71. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 72. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 73. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 74. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 76. Mendukung proses pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban konstitusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77. Mendukung proses pemenuhan hak asasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Saluran Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD | | Realisasi Renstra SKPD s.d. Renstra SKPD Tahun Laku (2016) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran yang direvisi (2017) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2017 (Akrif Tahun Pelaksanaan Renja SKPD th. 2017 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2017 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Kat |
|-----|------|---|---|---|---|-------------|--|-----------------|--|------------|--|-------|---|----|----------------------------|-----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | Pengembangan Nilai Budaya Lesep | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | 4 | 471.202.500 | 76.584.750 | 65.367.500 | 76.584.750 | 0,00 | 76.584.750 | 0,00 | 16,25 | Bag. Adm. Kesra | 16 | 17 | |
| | | Peningkatan Nilai Keagamaan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | 4 | 561.946.800 | 86.647.650 | 153.187.450 | 93.624.300 | 0,00 | 6.425.000 | 4,19 | 16,56 | Bag. Adm. Kesra | 16 | 17 | |
| | | fasilitas Peningkatan Narkotika melalui Sistem Penciptaan Pengawasan & Pembinaan Desa Narkotika (BAGSI) | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | 4 | 1.113.566.200 | 164.966.150 | 500.462.500 | 185.594.595.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | Bag. Adm. Kesra | 16 | 17 | |
| | | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Kali | 2 | 149.637.700 | 20.008.000 | 35.425.800 | 115.650.350 | 25,00 | 37,05 | 37,05 | 0,00 | Bag. | 16 | 17 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan | Paket | 15,00 | 115.650.350 | 25.966.000 | 11.560.000 | 37.526.000 | 0,00 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | Bag. dan Otda | 16 | 17 | |
| | | PROGRAM PINKSIKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BEMERKATI DIBERHAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Ortonomi Daerah (LEKOD) | Dok | 10 | 183.153.000 | 19.275.000 | 30.000.000 | 19.275.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bag. | 16 | 17 | |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng | Dok | 1 | 274.729.500 | 45.000.000 | 24.200.000 | 1.750.000 | 0,00 | 85,54 | 0,00 | 7,53 | Bag. dan Otda | 16 | 17 | |
| | | Pengusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten | Dok | 1 | 305.255.000 | 63.450.000 | 50.000.000 | 21.600.000 | 0,00 | 76,36 | 0,00 | 15,87 | Bag. dan Otda | 16 | 17 | |
| | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBUJUKAN PEMDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Dok | 4 | 690.719.550 | 30.000.000 | 97.000.000 | 30.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | Bag. dan Otda | 16 | 17 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan | Kec | 1 | 366.306.000 | 22.000.000 | 60.000.000 | 22.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bag. dan Otda | 16 | 17 | |
| | | Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan | Dok | 1 | 318.908.050 | 17.600.000 | 37.000.000 | 17.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | Bag. dan Otda | 16 | 17 | |
| | | Koordinasi Pembentukan Unsur Rupa Bumi Kabupaten Soppeng Kecamatan | Kec | 1 | 503.615.150 | 17.950.000 | 80.000.000 | 17.950.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,14 | Bag. dan Otda | 16 | 17 | |

| No. | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Saluran Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Basajan yang dievaluasi (2017) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th.2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2017 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Kat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|---|--------|---|--------|---|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 4 Fasilitasnya Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | Dok | 5 120.000.000 | 6 - | 7 400.000.000 | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | 32 - | 33 - | 34 - | 35 - | 36 - | 37 - | 38 - | 39 - | 40 - | 41 - | 42 - | 43 - | 44 - | 45 - | 46 - | 47 - | 48 - | 49 - | 50 - | 51 - | 52 - | 53 - | 54 - | 55 - | 56 - | 57 - | 58 - | 59 - | 60 - | 61 - | 62 - | 63 - | 64 - | 65 - | 66 - | 67 - | 68 - | 69 - | 70 - | 71 - | 72 - | 73 - | 74 - | 75 - | 76 - | 77 - | 78 - | 79 - | 80 - | 81 - | 82 - | 83 - | 84 - | 85 - | 86 - | 87 - | 88 - | 89 - | 90 - | 91 - | 92 - | 93 - | 94 - | 95 - | 96 - | 97 - | 98 - | 99 - | 100 - | 101 - | 102 - | 103 - | 104 - | 105 - | 106 - | 107 - | 108 - | 109 - | 110 - | 111 - | 112 - | 113 - | 114 - | 115 - | 116 - | 117 - | 118 - | 119 - | 120 - | 121 - | 122 - | 123 - | 124 - | 125 - | 126 - | 127 - | 128 - | 129 - | 130 - | 131 - | 132 - | 133 - | 134 - | 135 - | 136 - | 137 - | 138 - | 139 - | 140 - | 141 - | 142 - | 143 - | 144 - | 145 - | 146 - | 147 - | 148 - | 149 - | 150 - | 151 - | 152 - | 153 - | 154 - | 155 - | 156 - | 157 - | 158 - | 159 - | 160 - | 161 - | 162 - | 163 - | 164 - | 165 - | 166 - | 167 - | 168 - | 169 - | 170 - | 171 - | 172 - | 173 - | 174 - | 175 - | 176 - | 177 - | 178 - | 179 - | 180 - | 181 - | 182 - | 183 - | 184 - | 185 - | 186 - | 187 - | 188 - | 189 - | 190 - | 191 - | 192 - | 193 - | 194 - | 195 - | 196 - | 197 - | 198 - | 199 - | 200 - | 201 - | 202 - | 203 - | 204 - | 205 - | 206 - | 207 - | 208 - | 209 - | 210 - | 211 - | 212 - | 213 - | 214 - | 215 - | 216 - | 217 - | 218 - | 219 - | 220 - | 221 - | 222 - | 223 - | 224 - | 225 - | 226 - | 227 - | 228 - | 229 - | 230 - | 231 - | 232 - | 233 - | 234 - | 235 - | 236 - | 237 - | 238 - | 239 - | 240 - | 241 - | 242 - | 243 - | 244 - | 245 - | 246 - | 247 - | 248 - | 249 - | 250 - | 251 - | 252 - | 253 - | 254 - | 255 - | 256 - | 257 - | 258 - | 259 - | 260 - | 261 - | 262 - | 263 - | 264 - | 265 - | 266 - | 267 - | 268 - | 269 - | 270 - | 271 - | 272 - | 273 - | 274 - | 275 - | 276 - | 277 - | 278 - | 279 - | 280 - | 281 - | 282 - | 283 - | 284 - | 285 - | 286 - | 287 - | 288 - | 289 - | 290 - | 291 - | 292 - | 293 - | 294 - | 295 - | 296 - | 297 - | 298 - | 299 - | 300 - | 301 - | 302 - | 303 - | 304 - | 305 - | 306 - | 307 - | 308 - | 309 - | 310 - | 311 - | 312 - | 313 - | 314 - | 315 - | 316 - | 317 - | 318 - | 319 - | 320 - | 321 - | 322 - | 323 - | 324 - | 325 - | 326 - | 327 - | 328 - | 329 - | 330 - | 331 - | 332 - | 333 - | 334 - | 335 - | 336 - | 337 - | 338 - | 339 - | 340 - | 341 - | 342 - | 343 - | 344 - | 345 - | 346 - | 347 - | 348 - | 349 - | 350 - | 351 - | 352 - | 353 - | 354 - | 355 - | 356 - | 357 - | 358 - | 359 - | 360 - | 361 - | 362 - | 363 - | 364 - | 365 - | 366 - | 367 - | 368 - | 369 - | 370 - | 371 - | 372 - | 373 - | 374 - | 375 - | 376 - | 377 - | 378 - | 379 - | 380 - | 381 - | 382 - | 383 - | 384 - | 385 - | 386 - | 387 - | 388 - | 389 - | 390 - | 391 - | 392 - | 393 - | 394 - | 395 - | 396 - | 397 - | 398 - | 399 - | 400 - | 401 - | 402 - | 403 - | 404 - | 405 - | 406 - | 407 - | 408 - | 409 - | 410 - | 411 - | 412 - | 413 - | 414 - | 415 - | 416 - | 417 - | 418 - | 419 - | 420 - | 421 - | 422 - | 423 - | 424 - | 425 - | 426 - | 427 - | 428 - | 429 - | 430 - | 431 - | 432 - | 433 - | 434 - | 435 - | 436 - | 437 - | 438 - | 439 - | 440 - | 441 - | 442 - | 443 - | 444 - | 445 - | 446 - | 447 - | 448 - | 449 - | 450 - | 451 - | 452 - | 453 - | 454 - | 455 - | 456 - | 457 - | 458 - | 459 - | 460 - | 461 - | 462 - | 463 - | 464 - | 465 - | 466 - | 467 - | 468 - | 469 - | 470 - | 471 - | 472 - | 473 - | 474 - | 475 - | 476 - | 477 - | 478 - | 479 - | 480 - | 481 - | 482 - | 483 - | 484 - | 485 - | 486 - | 487 - | 488 - | 489 - | 490 - | 491 - | 492 - | 493 - | 494 - | 495 - | 496 - | 497 - | 498 - | 499 - | 500 - | 501 - | 502 - | 503 - | 504 - | 505 - | 506 - | 507 - | 508 - | 509 - | 510 - | 511 - | 512 - | 513 - | 514 - | 515 - | 516 - | 517 - | 518 - | 519 - | 520 - | 521 - | 522 - | 523 - | 524 - | 525 - | 526 - | 527 - | 528 - | 529 - | 530 - | 531 - | 532 - | 533 - | 534 - | 535 - | 536 - | 537 - | 538 - | 539 - | 540 - | 541 - | 542 - | 543 - | 544 - | 545 - | 546 - | 547 - | 548 - | 549 - | 550 - | 551 - | 552 - | 553 - | 554 - | 555 - | 556 - | 557 - | 558 - | 559 - | 560 - | 561 - | 562 - | 563 - | 564 - | 565 - | 566 - | 567 - | 568 - | 569 - | 570 - | 571 - | 572 - | 573 - | 574 - | 575 - | 576 - | 577 - | 578 - | 579 - | 580 - | 581 - | 582 - | 583 - | 584 - | 585 - | 586 - | 587 - | 588 - | 589 - | 590 - | 591 - | 592 - | 593 - | 594 - | 595 - | 596 - | 597 - | 598 - | 599 - | 600 - | 601 - | 602 - | 603 - | 604 - | 605 - | 606 - | 607 - | 608 - | 609 - | 610 - | 611 - | 612 - | 613 - | 614 - | 615 - | 616 - | 617 - | 618 - | 619 - | 620 - | 621 - | 622 - | 623 - | 624 - | 625 - | 626 - | 627 - | 628 - | 629 - | 630 - | 631 - | 632 - | 633 - | 634 - | 635 - | 636 - | 637 - | 638 - | 639 - | 640 - | 641 - | 642 - | 643 - | 644 - | 645 - | 646 - | 647 - | 648 - | 649 - | 650 - | 651 - | 652 - | 653 - | 654 - | 655 - | 656 - | 657 - | 658 - | 659 - | 660 - | 661 - | 662 - | 663 - | 664 - | 665 - | 666 - | 667 - | 668 - | 669 - | 670 - | 671 - | 672 - | 673 - | 674 - | 675 - | 676 - | 677 - | 678 - | 679 - | 680 - | 681 - | 682 - | 683 - | 684 - | 685 - | 686 - | 687 - | 688 - | 689 - | 690 - | 691 - | 692 - | 693 - | 694 - | 695 - | 696 - | 697 - | 698 - | 699 - | 700 - | 701 - | 702 - | 703 - | 704 - | 705 - | 706 - | 707 - | 708 - | 709 - | 710 - | 711 - | 712 - | 713 - | 714 - | 715 - | 716 - | 717 - | 718 - | 719 - | 720 - | 721 - | 722 - | 723 - | 724 - | 725 - | 726 - | 727 - | 728 - | 729 - | 730 - | 731 - | 732 - | 733 - | 734 - | 735 - | 736 - | 737 - | 738 - | 739 - | 740 - | 741 - | 742 - | 743 - | 744 - | 745 - | 746 - | 747 - | 748 - | 749 - | 750 - | 751 - | 752 - | 753 - | 754 - | 755 - | 756 - | 757 - | 758 - | 759 - | 760 - | 761 - | 762 - | 763 - | 764 - | 765 - | 766 - | 767 - | 768 - | 769 - | 770 - | 771 - | 772 - | 773 - | 774 - | 775 - | 776 - | 777 - | 778 - | 779 - | 780 - | 781 - | 782 - | 783 - | 784 - | 785 - | 786 - | 787 - | 788 - | 789 - | 790 - | 791 - | 792 - | 793 - | 794 - | 795 - | 796 - | 797 - | 798 - | 799 - | 800 - | 801 - | 802 - | 803 - | 804 - | 805 - | 806 - | 807 - | 808 - | 809 - | 810 - | 811 - | 812 - | 813 - | 814 - | 815 - | 816 - | 817 - | 818 - | 819 - | 820 - | 821 - | 822 - | 823 - | 824 - | 825 - | 826 - | 827 - | 828 - | 829 - | 830 - | 831 - | 832 - | 833 - | 834 - | 835 - | 836 - | 837 - | 838 - | 839 - | 840 - | 841 - | 842 - | 843 - | 844 - | 845 - | 846 - | 847 - | 848 - | 849 - | 850 - | 851 - | 852 - | 853 - | 854 - | 855 - | 856 - | 857 - | 858 - | 859 - | 860 - | 861 - | 862 - | 863 - | 864 - | 865 - | 866 - | 867 - | 868 - | 869 - | 870 - | 871 - | 872 - | 873 - | 874 - | 875 - | 876 - | 877 - | 878 - | 879 - | 880 - | 881 - | 882 - | 883 - | 884 - | 885 - | 886 - | 887 - | 888 - | 889 - | 890 - | 891 - | 892 - | 893 - | 894 - | 895 - | 896 - | 897 - | 898 - | 899 - | 900 - | 901 - | 902 - | 903 - | 904 - | 905 - | 906 - | 907 - | 908 - | 909 - | 910 - | 911 - | 912 - | 913 - | 914 - | 915 - | 916 - | 917 - | 918 - | 919 - | 920 - | 921 - | 922 - | 923 - | 924 - | 925 - | 926 - | 927 - | 928 - | 929 - | 930 - | 931 - | 932 - | 933 - | 934 - | 935 - | 936 - | 937 - | 938 - | 939 - | 940 - | 941 - | 942 - | 943 - | 944 - | 945 - | 946 - | 947 - | 948 - | 949 - | 950 - | 951 - | 952 - | 953 - | 954 - | 955 - | 956 - | 957 - | 958 - | 959 - | 960 - | 961 - | 962 - | 963 - | 964 - | 965 - | 966 - | 967 - | 968 - | 969 - | 970 - | 971 - | 972 - | 973 - | 974 - | 975 - | 976 - | 977 - | 978 - | 979 - | 980 - | 981 - | 982 - | 983 - | 984 - | 985 - | 986 - | 987 - | 988 - | 989 - | 990 - | 991 - | 992 - | 993 - | 994 - | 995 - | 996 - | 997 - | 998 - | 999 - | 1000 - | 1001 - | 1002 - | 1003 - | 1004 - | 1005 - | 1006 - | 1007 - | 1008 - | 1009 - | 1010 - | 1011 - | 1012 - | 1013 - | 1014 - | 1015 - | 1016 - | 1017 - | 1018 - | 1019 - | 1020 - | 1021 - | 1022 - | 1023 - | 1024 - | 1025 - | 1026 - | 1027 - | 1028 - | 1029 - | 1030 - | 1031 - | 1032 - | 1033 - | 1034 - | 1035 - | 1036 - | 1037 - | 1038 - | 1039 - | 1040 - | 1041 - | 1042 - | 1043 - | 1044 - | 1045 - | 1046 - | 1047 - | 1048 - | 1049 - | 1050 - | 1051 - | 1052 - | 1053 - | 1054 - | 1055 - | 1056 - | 1057 - | 1058 - | 1059 - | 1060 - | 1061 - | 1062 - | 1063 - | 1064 - | 1065 - | 1066 - | 1067 - | 1068 - | 1069 - | 1070 - | 1071 - | 1072 - | 1073 - | 1074 - | 1075 - | 1076 - | 1077 - | 1078 - | 1079 - | 1080 - | 1081 - | 1 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dengan tugas pokok tersebut, kinerja dari pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Disamping menggunakan SPM proses analisis dan pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan yang menjadi tupoksinya dapat pula menggunakan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, terdiri dari :

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah daerah;

2. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta administrasi umum;
4. Mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang perekonomian, pembangunan, sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat;
5. Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur dan penegakan disiplin aparatur;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian serta pengelolaan urusan sumber daya alam;
8. Mengoordinasikan dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan fasilitasi koordinasi bidang keagamaan;
9. Membina pelaksanaan tugas administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif;
10. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah terkait dengan mengoordinasikan layanan administrasi Sekretariat Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan;
11. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah;
12. Mengoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan perangkat daerah dan memberikan solusi pemecahan masalahnya;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, agar sesuai dengan rencana dan target yang direncanakan;
14. Mengarahkan dan memberi dukungan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dapat digambarkan berdasarkan telaahan sesuai dengan pengamatan dan kondisi yang mencakup faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan-pelayanan yang ada selama ini, Adapun isu-isu penting yang sangat mendesak untuk ditangani oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung tugas;
3. Rendahnya Penegakan Disiplin Aparatur;
4. Kapasitas SDM Aparatur kurang memadai;
5. Penataan pedoman yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme kerja maupun yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme pelayanan belum berjalan dengan baik;
6. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin pejabat dalam memahami jabatan dan tanggungjawab yang diembannya.

Beberapa isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang dapat berpengaruh dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor Peluang :
 1. Masih terbentang luas kesempatan aparat untuk membenahi diri dengan mengikuti Diklat-diklat, Bimtek-bimtek dalam upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur, dengan lebih banyak memberikan kesempatan kepada staf sehingga pada gilirannya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi atasan.
 2. Adanya peningkatan dana untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun peningkatan keterampilan, melalui bimtek, diklat-diklat dan semacamnya.

3. Tingginya komitmen pimpinan untuk berupaya membenahi sarana dan prasarana pendukung tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tingginya perhatian pimpinan untuk berupaya merumuskan sistem dalam rangka pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Masih adanya sebagian besar pegawai menyadari akan tugas dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diemban, sehingga masih terlihat motivasi kerja yang tinggi.

b. Faktor Ancaman

1. Belum sepenuhnya tercipta alur-alur mekanisme koordinasi baik antar bagian maupun lintas SKPD.
2. Masih lemahnya pengawasan, dan belum sepenuhnya dilakukan penerapan sanksi terhadap aparat yang kurang disiplin.
3. Tingkat kesejahteraan aparat belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga cenderung pegawai masih ada yang cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan demi untuk menambah penghasilan mereka.
4. Staf belum sepenuhnya memahami dengan jelas penjabaran tupoksinya.
5. Pelaksanaan Tugas dan fungsi belum dilengkapi dengan pedoman dan standar operasional prosedur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Terhadap Kebijakan Nasional, Prioritas pembangunan nasional merupakan penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden dan Wakil Preside terpilih yang secara garis besar memuat visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-royong. Kemudian diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 tersebut disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan Nasional tahun 2017 direncanakan sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai sebelumnya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dengan menerapkan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 khususnya pada Pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah yang memiliki sasaran dalam hal meningkatnya kapasitas keuangan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Adapun arah kebijakannya dalam rangka mendukung implementasi desentralisasi asimetris terfokus pada upaya penguatan tata kelola pemerintah daerah dalam aspek kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah serta penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat.

Arah Kebijakan pada peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan menempuh strategi:

- (1) Peningkatan penetapan APBD tepat waktu;
- (2) Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis;
- (3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- (4) Penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu;
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Daerah;
- (6) Pelaksanaan Peningkatan Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah;
- (7) Harmonisasi Regulasi Pusat-Daerah;
- (8) Penataan Daerah; dan
- (9) Penguatan kapasitas aparatur Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.

Disamping itu terdapat kebijakan lain yang perlu diadakan perkuatan antara lain:

1. Pengembangan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah Dalam rangka mengembangkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, maka kebijakan pembangunan tahun 2017 adalah: (a) Meningkatnya kemampuan fiskal daerah; (b) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah; serta (c) Meningkatnya kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas, kebijakan pembangunan tahun 2017, adalah: (a) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan aparatur pemerintah daerah; (b) Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan, kependudukan, keuangan daerah dan kepemimpinan pemerintah daerah; serta (c) Terlaksananya standarisasi, sertifikasi, dan kerjasama diklat pemerintahan dalam negeri.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Dalam rangka meningkatkan pembangunan kelembagaan pemerintahan daerah 2017, kebijakan pembangunan tahun 2017 adalah tersusunnya restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD); terlaksananya penataan kewenangan di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah; terlaksananya penataan daerah; terjalinnnya kerjasama daerah yang baik; penyusunan harmonisasi peraturan perundangan; terciptanya sinergi di bidang perencanaan maupun penganggaran di pusat maupun daerah; penataan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan;

terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik; terlaksananya efektivitas pelaksanaan otonomi khusus dan penguatan kapasitas kepala daerah dan DPRD.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, baik desentralisasi maupun otonomi daerah memerlukan sejumlah kerangka pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaannya:

- (1) Pendanaan untuk pengembangan atau inovasi pelayanan public atau peningkatan belanja infrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah, dan masyarakat;
- (2) Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendanaan dana transfer khususnya DAK harus mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Terhadap Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan pembangunan Tahun 2017 diarahkan kepada pencapaian sasaran program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, namun tetap memperhatikan analisa kelayakan dan rasionalisasi pencapaiannya. Untuk mendukung capaian sasaran tersebut, maka disusun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dan saling terkait, saling mendukung satu dengan lainnya, di mana keberhasilan pelaksanaan salah satu arah kebijakan juga turut menentukan keberhasilan agenda kebijakan lainnya. Oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional.

Adapun fungsi pokok dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu Tahun kedepan.
3. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan Program Kegiatan Prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dan
4. Menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Menyesuaikan dengan Dokumen Renstra 2011-2015, maka tujuan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Terciptanya sistim administrasi pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
3. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas dan dapat diukur dari tahun ke tahun;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya Koordinasi dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Pelaksanaan Mekanisme dan Alur Pembangunan Perekonomian Daerah untuk Peningkatan Pelayanan Prima;
2. Terwujudnya pengembangan Sistim Administrasi Pemerintahan yang Handal, Demokratis, Profesional, Bersih, Terbuka dan Partisipatif dan Tanggap Terhadap Aspirasi Masyarakat;
3. Terciptanya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Masyarakat, Pengelolaan Anggaran serta Penciptaan Budaya Kerja Aparatur yang Baik dan Berkeadilan;
4. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Daerah yang handal dan bertanggung jawab;
5. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Sekretariat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN KDH DAN WKDH

- Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri
- Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH

- Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan
- Evaluasi Jabatan
- Penyusunan Kompetensi Jabatan
- Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi
- Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi
- Pengawasan Melekat (Waskat)

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK

- Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
- Penguatan Kinerja Pelayanan Publik
- Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
- Inovasi Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

PROGRAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA MISKIN

- Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

- Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Kajian peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah
- Publikasi peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau
- Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan

PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA

- Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/ Pemulangan Jamaah haji
- Fasilitasi pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan
- Fasilitasi pelaksanaan/keikutsertaan MTQ & STQ
- Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Shaleh
- Pengembangan nilai budaya LASQI
- Peningkatan nilai-nilai keagamaan
- Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem pencegahan penyalagunaan & pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

- Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan Di Kecamatan

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

- Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN

- Orientasi Keprotokoleran
- Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

- Sosialisasi Pemahaman Persandian
- Pelaksanaan Tata Kelola jaminan Keamanan Informasi Menggunakan Persandian
- Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten Soppeng
- Sosialisasi Pemahaman Persandian
- Fasilitasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah daerah

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN PROMOSI INVESTASI

- Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah

PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DAERAH

- Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se- Kabupaten Soppeng
- Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten

PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)
- Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE)
- Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI

KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- Kegiatan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Kab. Soppeng
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Soppeng
- Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Soppeng

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Soppeng
Evaluasi Mandiri Berbasis Kinerja

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

- Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal
- Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
- Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Harga Khusus Padi, Jagung dan Kedelai
- Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan data Pameran Pemerintah Daerah

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Soppeng

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Soppeng

Kegiatan Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama di Kabupaten Soppeng

- Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng

Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi

Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian

Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran

Koordinasi dan pembinaan tambang

Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu lintas Ternak

Fasilitasi Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Pedesaan
- Fasilitasi Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal

- Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat

Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan KB

Fasilitasi dan koordinasi Pengendalian Zoonosis

PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta
- Penyediaan Jasa Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Pemeliharaan Rutin Berkala -Peralatan Studio

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Administrasi Kepegawaian
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangpundangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Adapun perubahan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Perubahan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Rencana 2018

SKPD : Sekretariat Daerah

| Kode | Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2017 | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 | | | |
|---------|---|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Pagu Sebelum Perubahan | Usulan Pagu Perubahan | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Catatan Penting | target capaian kinerja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.04 | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | | | | | | | | | |
| 4.04.03 | 01 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah | Dalam dan Luar Kab. Soppeng | 231 kali | Rp 149.637.700,- | 147.837.700 | Bag. Pem.Otda | - | 231 kali | Rp 149.637.700,- |
| 4.04 | 01 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran | Watansoppeng | 11 Paket | Rp 115.650.350,- | 98.300.350 | Bag. Pem.Otda | - | 11 Paket | Rp 115.650.350,- |
| 4.04 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | | | | | |
| 4.04 | 01 - Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Tersedianya laporan EKPOD Sekretariat Daerah | Kab. Soppeng | 1 dok | Rp 19.275.000,- | 19.275.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 dok | Rp 19.275.000,- |
| 4.04 | 02 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati | tersedianya laporan (LKP) | Kab. Soppeng | 1 dok | Rp 24.200.000,- | 20.700.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 dok | Rp 24.200.000,- |
| 4.04 | 03 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten | tersedianya laporan (LPPD) | Kab. Soppeng | 1 dok, 1 Publikasi | Rp 63.450.000,- | 79.050.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 dok, 1 Publikasi | Rp 63.450.000,- |
| 4.04 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA | | | | | | | | | |
| 4.04 | 04 - Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | tersedianya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | 8 Kecamatan | 1 dok | Rp 30.000.000,- | 30.000.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 dok | Rp 30.000.000,- |
| 4.04 | 07 - Fasilitasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan | Terlaksananya PATEN di Kecamatan | 8 Kecamatan | 1 Kec | Rp 22.000.000,- | 22.000.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 Kec | Rp 22.000.000,- |
| 4.04 | 11 - Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Tersedianya data mengenai wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Kab. Soppeng | 1 dok | Rp 17.600.000,- | 26.400.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 dok | Rp 17.600.000,- |
| 4.04 | 12 - Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng | Tersedianya data Pembakuan Nama Rupabumi Kab. Soppeng | 8 Kecamatan | 1 dok | Rp 17.950.000,- | 17.950.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 dok | Rp 17.950.000,- |
| 4.04 | 19 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | Terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | Kab. Soppeng | 100% | Rp 26.620.000,- | 24.870.000 | Bag. Pem.Otda | - | 100% | Rp 26.620.000,- |
| 4.04 | 24 - Fasilitasi dan Koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal | terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi Masalah Keamanan dan Pencegahan Tindak kriminal | Kab. Soppeng | 100% | Rp 82.700.000,- | 82.700.000 | Bag. Pem.Otda | - | 100% | Rp 82.700.000,- |
| 4.04 | 30 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Daerah dan DPRD (PAW) | Tersedianya data Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD | Kab. Soppeng | 1 dok | Rp 23.450.000,- | 23.450.000 | Bag. Pem.Otda | - | 1 dok | Rp 23.450.000,- |
| 1.06 | Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum Keluarga miskin | | | | | | | | | |
| 1.06 | 03 01 - Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin | Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum | | 100 org | Rp 53.025.000,- | 53.025.000 | Bag. Hukum dan UU | - | 100 org | Rp 26.616.299,- |
| 4.04 | Program Pelayanan Perkantoran | | | | | | | | | |
| 4.04 | 01 10 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | | 325 kali | Rp 92.833.400,- | 137.274.400 | Bag. Hukum dan UU | - | 135 kali | Rp 67.833.400,- |
| 4.04 | 01 11 - Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran | pelebaran administrasi perkantoran | | 12 bulan | Rp 86.191.801,- | 86.191.801 | Bag. Hukum dan UU | - | 12 bulan% | Rp 90.391.801,- |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2017 | | | | Usulan Pagu Perubahan | Unit Kerja Penanggung Jawab | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 | |
|------------|--|---|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Pagu Sebelum Perubahan | Pagu Setelah Perubahan | | | | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4.04 | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | | | | | | | |
| 4.04.03.08 | Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | Terlaksananya proses tindak lanjut hasil temuan | | 85 LHP | Rp 72.330.000,- | 72.330.000 | Bag. Hukum dan UU | - | 85 LHP | Rp 52.330.000,- | |
| 4.04.03.08 | Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah | Tetangannya kasus pemerintah daerah | | 2 kasus | Rp 165.650.000,- | 159.650.000 | Bag. Hukum dan UU | - | 2 kasus | Rp 130.650.000,- | |
| 4.04.03.08 | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | Terlaksananya sosialisasi pengawasan TP4D | | 12 bulan | Rp 29.637.500,- | 29.637.500 | Bag. Hukum dan UU | - | 12 bulan | Rp 20.637.500,- | |
| 4.04.03.11 | Program Penataan peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| 4.04.03.11 | Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan pemahaman 100 org terhadap undang-undang HAM | | 150 org | Rp 26.387.500,- | 26.387.500 | Bag. Hukum dan UU | - | 150 org | Rp 19.387.500,- | |
| 4.04.03.11 | Kegiatan pengelolaan Data LHKPN | Tersedianya data LHKPN di Kab.Soppeng | | 100 org | Rp 34.600.000,- | 34.600.000 | Bag. Hukum dan UU | - | 100org | Rp 26.600.000,- | |
| 4.04.03.11 | Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Terciptanya Rancangan PERDA | | 16 PERDA | Rp 182.548.750,- | 205.798.750 | Bag. Hukum dan UU | - | 16 perda | Rp 127.548.750,- | |
| 4.04.03.11 | Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Kelompok Kadarum | | 30 Kelompok | Rp 114.141.000,- | 102.450.000 | Bag. Hukum dan UU | - | 30 klip | Rp 93.141.000,- | |
| 4.04.03.11 | Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah | Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan per- UU-an yg berlaku | | 100 Org | Rp 66.155.000,- | 66.155.000 | Bag. Hukum dan UU | - | 100 org | Rp 57.155.000,- | |
| 4.04.03.11 | Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau | terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rokok kepada masyarakat | | 400 Org | Rp 87.708.750,- | 87.708.750 | Bag. Hukum dan UU | - | 400 org% | Rp 87.708.750,- | |
| 4.04.03.03 | Program Penguatan Kelembagaan Daerah | | | | | | | | | | |
| 4.04.03.03 | Penyusunan Kompetensi Jabatan | Dokumen penyusunan syarat jabatan | Kec. Lalabata | 1 dok. | Rp 82.196.850,- | 82.196.850 | Bagian Ortala | - | 100% | Rp 30.000.000,- | |
| 4.04.03.03 | Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi | Dokumen hasil evaluasi kelembagaan dan fungsi | Kec. Lalabata | 2 dok. | Rp 44.557.700,- | 44.557.700 | Bagian Ortala | - | 200% | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04.03.03 | Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi | Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB | Kec. Lalabata | 1 dok. | Rp 54.241.075,- | 46.892.825 | Bagian Ortala | - | 100% | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04.03.03 | Evaluasi Jabatan | Dokumen hasil evaluasi jabatan | Kec. Lalabata | 38 SKPD | Rp - | - | Bagian Ortala | - | 38 SKPD | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04.03.03 | Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan | Pedoman tata naskah, pakaiat dinas, mekanisme dan produksi kerja | Kec. Lalabata | 1 dok. | Rp - | - | Bagian Ortala | - | 100% | Rp 20.000.000,- | |
| 4.04.03.03 | Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja dan evaluasi | Kec. Lalabata | 1 dok. | Rp - | - | Bagian Ortala | - | 100% | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04.03.03 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur | Dokumen standar operasional prosedur | Kec. Lalabata | 1 dok. | Rp - | - | Bagian Ortala | - | 100% | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04.03.12 | Program Pengembangan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik | | | | | | | | | | |
| 4.04.03.12 | Penguatan Kinerja Pelayanan Publik | Perda. Perbu. Pelayanan Publik | Kec. Lalabata | 2 dok. | Rp 49.589.675,- | 49.589.675 | Bagian Ortala | - | - | Rp - | |
| 4.04.03.12 | Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik | Terpenuhinya standar pelayanan dan kepuasan masyarakat | Kec. Lalabata | 38 SKPD | Rp - | - | Bagian Ortala | - | 38 SKPD | Rp 30.000.000,- | |
| 4.04.03.12 | Pemilaian Kinerja Pelayanan Publik | UKPP yang bersyarat untuk dinilai | Kec. Lalabata | 2 SKPD | Rp 26.979.750,- | 26.979.750 | Bagian Ortala | - | 2 SKPD | Rp 30.000.000,- | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2017 | | | | Usulan Pagu Perubahan | Unit Kerja Penanggung Jawab | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 | |
|------|---|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Pagu Sebelum Perubahan | Pagu Setelah Perubahan | | | | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4.04 | 4.04.03 12 04 - Inovasi Pelayanan Publik | Terlaksananya kompetensi i inovasi pelayanan publik | Kec. Lalabata | 6 SKPD | Rp 181.852.475,- | 50.572.500 | Bagian Ortala | - | 6 SKPD | Rp 50.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 12 05 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik | Jumlah SKPD/ Dokumen | Kec. Lalabata | 1 SKPD | Rp 79.154.775,- | 119.154.775 | Bagian Ortala | - | 1 SKPD | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 01 - Program Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pemda | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 04 01 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD | Evaluasi tugas pokok dan fungsi SKPD | Kec. Lalabata | 24 kali | Rp 47.667.125,- | 47.667.125 | Bagian Ortala | - | 24 kali | Rp 45.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 01 10 - Program Pelayanan Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 01 10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya | Mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi | Kec. Lalabata | 129 Kali | Rp 157.368.350,- | 157.368.350 | Bagian Ortala | - | 375 kali | Rp 80.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Kec. Lalabata | 1 Tahun | Rp 48.155.800,- | 48.155.800 | Bagian Ortala | - | 1 Tahun | Rp 50.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 01 12 - Penyediaan Jasa Perkantoran | Realisasi jasa perkantoran | Kec. Lalabata | 21 org. | Rp 105.466.200,- | 105.466.200 | Bagian Ortala | - | 21 org. | Rp 105.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 03 09 - Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur | Jumlah orang yang ikut Bimtek | Kec. Lalabata | 20 org. | Rp 81.778.800,- | 260.217.025 | Bagian Ortala | - | 20 org. | Rp 60.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 03 09 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah aparat | Kec. Lalabata | 152 org. | Rp 27.538.600,- | 27.538.600 | Bagian Ortala | - | 152 org. | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 03 17 - Peningkatan Disiplin Aparatur | Tercatatnya data/Administrasi kepegawaian setda | Kec. Lalabata | 152 org. | Rp 47.134.450,- | 47.134.450 | Bagian Ortala | - | 152 org. | Rp 25.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 03 18 - Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 01 10 - PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 01 10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya | terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | kab.Soppeng dan Luar Kab.Soppeng | 100% | Rp 181.669.800,- | 127.064.900 | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 100% | Rp 199.836.780,- | |
| 4.04 | 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi | watansoppeng | 100% | Rp 84.569.300,- | 84.569.300 | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 100% | Rp 93.026.230,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 02 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIYAKUAN PEMUDA | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 04 02 - Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang ketentuan dibidang cukai | kab.soppeng | 1 kali | Rp 43.001.600,- | 44.401.600,- | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 1 kali | Rp 66.550.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 03 - Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembaku Ilegal | Data Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring kebijakan DBHCHT | watansoppeng | 4 dok. | Rp 103.049.950,- | 156.254.850,- | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 4 dok. | Rp 222.640.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 13 - Fasilitasi Agen/Pangkalian BBM dan LPG Bersubsidi | Penerbitan dan Pengawasan harga, Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi | Kab.Soppeng | 1 dok. | Rp 6.900.000,- | 6.900.000,- | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 1 dok. | Rp 40.700.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 14 - Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian | Terciptanya percepatan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura | Kab.Soppeng | 1 dok. | Rp 10.525.000,- | 10.525.000,- | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 1 dok. | Rp 60.500.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 15 - Koordinasi Teknis Penerbitan Ternak Berkeliaran | Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat | kab.soppeng | 4 kali | Rp 9.003.925,- | 9.003.925,- | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 4 kali | Rp 38.500.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 17 - Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu Lintas Ternak | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang produksi peternakan yang ASUH | kab.soppeng | 1 dok. | Rp 11.512.500,- | 11.512.500,- | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 1 dok. | Rp 27.500.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 25 - Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi | Terlaksananya Koordinasi / Kerjasama pemantauan dibidang infiasi daerah | watansoppeng | 100% | Rp 6.703.700,- | 6.703.700,- | Bagian Adm.Perekonomian & SDA | - | 100% | Rp 77.000.000,- | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2017 | | | | Usulan Pagu Perubahan | Unit Kerja Penanggung Jawab | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 | |
|------|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Pagu Sebelum Perubahan | Pagu Setelah Perubahan | | | | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4.04 | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 01 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya | dalam & Luar Kab. Soppeng | 350 kali | Rp 135.665.000,- | Rp 141.365.000,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 350 kali | Rp 124.365.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 01 11 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Watansoppeng | 12 bulan | Rp 160.327.600,- | Rp 154.627.600,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 12 bulan | Rp 130.919.268,- | |
| 4.04 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 04 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan RENCANA Realisasi Kinerja SKPD | Watansoppeng | 1 dok | Rp 11.287.500,- | Rp 10.412.500,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 1 dok | Rp 6.912.500,- | |
| 4.04 | 4.04.03 04 05 | Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan Darat dan Data Pameran Pemerintah Daerah | Watansoppeng | 1 dok | Rp 550.000,- | Rp 550.000,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 1 dok | Rp 137.500,- | |
| 4.04 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMUDA | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 06 01 | Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se-Kabupaten Soppeng | Kab. Soppeng | 1 dok | Rp 14.500.000,- | Rp 14.115.500,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 1 dok | Rp 7.250.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 06 02 | Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten | Kab. Soppeng | 1 dok | Rp 39.400.000,- | Rp 40.660.000,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 1 dok | Rp 33.928.232,- | |
| 4.04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 07 01 | Penyelenggaraan Unit Layanan Barang/ Jasa (ULP) | Watansoppeng | 110 pkt | Rp 208.225.000,- | Rp 208.225.000,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 115 pkt | Rp 196.350.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 07 03 | Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa | Kab. Soppeng | 1 dok | Rp 1.375.000,- | Rp 1.375.000,- | Bag. Adm. Pembangunan | - | 1 dok | Rp 137.500,- | |
| 4.04 | Program Pelayanan Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 01 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta kedinasan lainnya | Luar & dalam Kab. Soppeng | 98 kali | Rp 140.987.600,- | Rp 140.987.600,- | Bag. Adm. Kesra | - | 150 kali | Rp 140.987.600,- | |
| 4.04 | 4.04.03 01 11 | Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran | Watansoppeng | 1 Tahun | Rp 83.569.700,- | Rp 83.569.700,- | Bag. Adm. Kesra | - | 1 Tahun | Rp 83.569.700,- | |
| 4.04 | Prog Fasilitasi & Koord Kebijakan Pemda | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 04 26 | Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat | Watansoppeng | 3 Kali | Rp 26.060.000,- | Rp 26.060.000,- | Bag. Adm. Kesra | - | 4 Kali | Rp 46.755.250,- | |
| 4.04 | Prog Koord & Fasilitasi Kesra, Keagamaan dan Peninggalan Narkoba | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 05 01 | Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/ Pemulangan Ja Tersedianya Transportasi Jamaah haji dari Soppeng ke Asrama Haji | Watansoppeng | 2 kali | Rp 441.507.500,- | Rp 451.507.500,- | Bag. Adm. Kesra | - | 2 kali | Rp 451.507.500,- | |
| 4.04 | 4.04.03 05 02 | Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan | Watansoppeng | 6 Keg | Rp 167.225.000,- | Rp 247.325.050,- | Bag. Adm. Kesra | - | 6 Keg | Rp 167.225.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 05 03 | Keg. Fasilitasi Pelaksanaan/keikutsertaan MTQ & STQ | - | 1 Keg | Rp 130.767.500,- | Rp 119.360.000,- | Bag. Adm. Kesra | - | 1 Keg | Rp 135.767.500,- | |
| 4.04 | 4.04.03 05 04 | Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Sholeh | Watansoppeng | 1 Keg | Rp 90.290.000,- | Rp 84.590.000,- | Bag. Adm. Kesra | - | 1 Keg | Rp 75.000.000,- | |
| 4.04 | 4.04.03 05 05 | Keg. Pengembangan Nilai Budaya LASQI | 8 Kec | 1 Keg | Rp 65.367.500,- | Rp 42.617.500,- | Bag. Adm. Kesra | - | 1 Keg | - | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2017 | | | | Usulan Pagu Perubahan | Unit Kerja Penanggung Jawab | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 | | | | |
|------|---|--|--------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|--------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Pagu Sebelum Perubahan | Pagu Setelah Perubahan | | | | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 05 | 06 | Keg. Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan | - Terlaksananya Kajian Agama untuk Peningkatan nilai-Nilai Keagamaan dan Takbir | - Terlaksananya Lomba Pukul Bedug dan Takbir | Watansoppeng | 12 Keg | Rp 1.531.874.500,- | Rp 131.587.450,- | Bag. Adm. Kesra | - | 12 Keg | Rp 149.187.450,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 05 | 07 | Keg. Fasilitas Penanganan Narkoba Melalui Sistem Pencegahan | Penyuluhan Penanganan Narkoba | | Watansoppeng | 70 kali | Rp 500.462.500,- | Rp 509.219.950,- | Bag. Adm. Kesra | - | 1 Keg | Rp 175.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 01 | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terperuhnya jasa komunikasi, air dan listrik | | | 12 Bulan | Rp 1.203.675.000,- | Rp 1.273.675.000,- | Bag. Umum | - | 12 Buh | Rp 1.089.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Perbandingan perpanjangan perizinan kendaraan dinas | | | 69 Unit | Rp 52.300.000,- | Rp 54.300.000,- | Bag. Umum | - | 69 Unit | Rp 66.913.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 05 | Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor | Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor | | | 12 bulan | Rp 301.625.000,- | Rp 309.275.000,- | Bag. Umum | - | 12 Bulan | Rp 259.726.500,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik/penerangan dan peralatan listrik lainnya | | | 12 bulan | Rp 100.000.000,- | Rp 130.000.000,- | Bag. Umum | - | 12 Bulan | Rp 100.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 09 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Telaksananya Pengisian Tabung Gas | | | 307 Buah | Rp 40.000.000,- | Rp 40.000.000,- | Bag. Umum | - | 307 Buah | Rp 52.683.400,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasannya | Teraksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | | | 12 Bulan | Rp 175.200.000,- | Rp 305.200.000,- | Bag. Umum | - | 12 Bulan | Rp 484.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 11 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | | | 12 Bulan | Rp 1.581.560.000,- | Rp 1.953.010.000,- | Bag. Umum | - | 12 Bulan | Rp 1.581.560.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 14 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH | Tersedianya makan dan minum rumah tangga Bupati/Wakil Bupati | | | 12 Bulan | Rp 1.020.000.000,- | Rp 1.020.000.000,- | Bag. Umum | - | 12 Bulan | Rp 1.234.200.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH | Tenwujudnya pelayanan kesehatan Bupati/Wakil Bupati | | | 2 Orang | Rp 75.000.000,- | Rp 75.000.000,- | Bag. Umum | - | 2 Orang | Rp 121.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 01 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 08 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan | Tersedianya peralatan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati | | | 3 Unit | Rp 154.000.000,- | Rp 274.250.000,- | Bag. Umum | - | | - |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | | | 3 Unit | Rp 184.220.000,- | Rp 490.741.000,- | Bag. Umum | - | | - |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 10 | Pengadaan Mebleur | Tersedianya Mebleur | | | t tahun | Rp 199.075.000,- | Rp 259.800.000,- | Bag. Umum | - | | - |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati | | | 2 Unit | Rp 100.000.000,- | Rp 232.000.000,- | Bag. Umum | - | 2 Unit | Rp 50.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah dinas | | | 3 unit | Rp 70.000.000,- | Rp 80.000.000,- | Bag. Umum | - | 3 Unit | Rp 50.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana | | | 4 unit | Rp 335.000.000,- | Rp 405.000.000,- | Bag. Umum | - | 4 Unit | Rp 150.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan Bupati/Wakil Bupati | | | 2 unit | Rp 429.000.000,- | Rp 474.000.000,- | Bag. Umum | - | 2 Unit | Rp 400.000.000,- |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2017 | | | | Rencana Tahun 2018 | | | | | |
|------|---|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Pagu Sebelum Perubahan | Usulan Pagu Perubahan | Unit Kerja Penanggung Jawab | Catatan Penting | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/pagu indikatif | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/ operasional | 87 unit | Rp 1.700.000.000,- | Rp 2.010.599.000,- | Bag. Umum | - | 87 Unit | Rp 900.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah jabatan | Terpeliharanya peralatan rumah tangga rujab Bupati/Wakil Bupati | 2 unit | Rp 65.000.000,- | Rp 75.864.000,- | Bag. Umum | - | 2 Unit | Rp 114.950.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | 3 unit | Rp 60.000.000,- | Rp 85.000.000,- | Bag. Umum | - | 3 Unit | Rp 129.470.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONAL | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 03 | 01 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Terwujudnya pakaian Bupati dan Wakil Bupati | 37 paket | Rp 125.000.000,- | Rp 125.000.000,- | Bag. Umum | - | 37 Paket | Rp 111.925.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | | PROGRAM PENINGKATAN KEDINESAN KDH DAN WKDH | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 01 | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat | Terwujudnya pelayanan kedinasan Bupati/ Wakil Bupati | 25 kali | Rp 1.101.000.000,- | Rp 1.536.000.000,- | Bag. Umum | - | 25 Kali | Rp 697.142.100,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 02 | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri | Terwujudnya pelayanan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri | 22 kali | Rp 1.670.000.000,- | Rp 2.018.600.000,- | Bag. Umum | - | 22 Kali | Rp 700.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 03 | Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah | Terwujudnya kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati | 182 kali | Rp 106.800.000,- | Rp 111.300.000,- | Bag. Umum | - | 182 kali | Rp 185.130.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 04 | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | Terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya | 107 kali | Rp 522.300.000,- | Rp 710.800.000,- | Bag. Umum | - | 107 kali | Rp 522.300.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 08 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia | 50 Media | Rp 250.000.000,- | Rp 250.000.000,- | Bagian Humas Dan Protokol | - | 55 Media | Rp 200.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 10 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya | Mengikuti Rapat - rapat, Kordinasi dan Konsultasi | 350 Kali | Rp 434.088.100,- | Rp 433.338.100,- | Bagian Humas Dan Protokol | - | 375 kali | Rp 350.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 11 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Rp 138.822.150,- | Rp 144.572.150,- | Bagian Humas Dan Protokol | - | 12 Bulan | Rp 174.196.150,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 01 | 17 | Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta | Jumlah Petugas Operasional Mess Pemda yang Terbayarkan | 6 Kegiatan | Rp 279.379.000,- | Rp 465.000.000,- | Bagian Humas Dan Protokol | - | 9 Kegiatan | Rp 200.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi | Jumlah Peralatan yang Dipelihara | 6 Unit | Rp 10.000.000,- | Rp 10.000.000,- | Bagian Humas Dan Protokol | - | 8 Unit | Rp 10.000.000,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 09 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN | | | | | | | | |
| 4.04 | 4.04.03 | 09 | 01 | Orientasi Keprotokoleraan | Jumlah Peserta Orientasi | 80 Orang | Rp 70.453.850,- | Rp 70.453.850,- | Bagian Humas Dan Protokol | - | 100 Orang | Rp 70.453.850,- |
| 4.04 | 4.04.03 | 09 | 02 | Peningkatan Kegiatan Keprotokoleraan | Lancarnya Setiap Acara Melalui Peningkatan Keprotokoleraan | 55 kali | Rp 190.936.900,- | Rp 185.936.900,- | Bagian Humas Dan Protokol | - | 70 kali | Rp 195.350.000,- |

| Kode | Usuan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2017 | | | | Usulan Pagu Perubahan | Unit Kerja Penanggung Jawab | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 | |
|---------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Pagu Sebelum Perubahan | Pagu Perubahan | | | | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4.04 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 4.04.03 | 01 04 | Terselesainya Administrasi Keuangan Tepat Waktu | Lalabata | 32 orang | Rp 417.560.450,- | Rp 412.560.275,- | Bag.Keuangan | - | 32 orang | Rp 407.418.875,- | |
| 4.04 | 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinmas lainnya | Lalabata | 12 Bulan | Rp 82.393.000,- | Rp 105.218.325,- | Bag.Keuangan | - | 12 Bulan | Rp 88.393.000,- | |
| 4.04 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | |
| 4.04 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Lalabata | 3 Dokumen | Rp 28.625.000,- | Rp 26.624.925,- | Bag.Keuangan | - | 3 Dokumen | Rp 28.625.000,- | |
| 4.04 | 02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Lalabata | 2 Dokumen | Rp 12.450.625,- | Rp 12.450.625,- | Bag.Keuangan | - | 2 Dokumen | Rp 12.450.625,- | |
| 4.04 | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Lalabata | 2 Dokumen | Rp 22.275.000,- | Rp 19.449.925,- | Bag.Keuangan | - | 2 Dokumen | Rp 22.275.000,- | |
| 4.04 | 08 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Lalabata | 13 orang | Rp 45.837.500,- | Rp 95.837.500,- | Bag.Keuangan | - | 13 orang | Rp 45.837.500,- | |

BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu pedoman dasar dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun ini yang memuat perencanaan yang sistematis, terukur dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA SKPD) Sekretariat Daerah juga merupakan dasar dan acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang bersifat tahunan.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan harapan agar semua unsur yang ada pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng maupun semua SKPD yang ada pada Lingkup Pemkab. Soppeng tidak hanya sebagai tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi dan kadang sifatnya tak terduga.

Semoga Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat memberikan masukan dan sumbangsih yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada periode Tahun 2017.

Watansoppeng, 8 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



NUR ALAM, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19581231 198503 1 182